

ABSTRAK

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG)

Oleh

FIKRI ISNAINI SAPUTRA

Praktik politik uang tentu dapat merusak sistem demokrasi yang ada, hal ini dikarenakan praktik tersebut mampu melahirkan kontestasi pemilu yang timpang. Pelanggaran politik uang ini tentu menjadi tugas Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Untuk itu, peneliti tertarik melihat bagaimana strategi preventif dan represif Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran politik uang pada Pemilihan Kepada Daerah Kab/Kota. Hal ini dilakukan guna memberikan sumbangsih pemikiran dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat 9 informan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melakukan strategi preventif berupa instruksi kepada Bawaslu Kab/Kota. Instruksi tersebut berisi arahan untuk membentuk tim patroli pengawasan anti politik uang dan melakukan koordinasi dengan KPU, peserta pemilu, hingga panitia pengawas. Selain itu, Bawaslu Provinsi Lampung juga melakukan rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota dan melakukan pengembangan untuk menggaet pengawas partisipatif. Selain itu, strategi represif dilakukan apabila terdapat laporan pelanggaran administrasi politik uang TSM dari Bawaslu Kab/Kota. Namun di sisi lain, dalam kaca mata tindakan sosial Talcott Parsons, strategi yang dilakukan tersebut belum mengarah kepada hambatan yang terjadi di lapangan. Mestinya, strategi yang dilakukan selaras dengan hambatan yang terjadi di masyarakat. Hambatan tersebut seperti tidak adanya bentuk komitmen dari pasangan calon untuk tidak melakukan politik uang, kurangnya kesadaran masyarakat, hingga regulasi yang masih lemah.

Kata kunci: Strategi, Bawaslu Provinsi Lampung, politik uang

ABSTRACT**STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN
HANDLING MONEY POLITICS AT THE ELECTIONS REGIONAL HEAD
REGENCY/CITY (CASE STUDY THE GENERAL ELECTION
SUPERVISORY AGENCY OF LAMPUNG PROVINCE)**

By

FIKRI ISNAINI SAPUTRA

The practice of money politics can certainly damage the existing democratic system, this is because the practice is able to create unequal election contestation. This violation of money politics is certainly the task of Bawaslu as an election supervisory institution. For this reason, researchers are interested in seeing how the preventive and repressive strategies of Bawaslu Lampung Province in handling money politics violations in the Regency/City Regional Elections. This is done in order to contribute ideas in realising fair and just elections. The method in this research uses a qualitative method with a case study approach. There are 9 informants in this study with data collection techniques in the form of interviews and documentation techniques.

The results of the study stated that Bawaslu Lampung Province carried out a preventive strategy in the form of instructions to Bawaslu Regency/City. The instruction contains directions to form an anti-money politics surveillance patrol team and coordinate with the KPU, election participants, and the supervisory committee. In addition, the Lampung Provincial Bawaslu also held a coordination meeting on institutional strengthening with the Regency/City Bawaslu and developed to attract participatory supervisors. In addition, repressive strategies are carried out if there are reports of administrative violations of TSM money politics from Bawaslu Kab/Kota. But on the other hand, in Talcott Parsons' social action perspective, the strategies carried out have not led to obstacles that occur in the field. The strategy should be in line with the obstacles that occur in society. These obstacles include the absence of a form of commitment from candidate pairs not to carry out money politics, lack of public awareness, and weak regulations.

Keywords: Strategy, Lampung Province Bawaslu, money politics